



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 00 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.81);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 00 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 00);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 51.120.250.530,00
b. Dana Perimbangan	Rp 881.822.886.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 204.496.254.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 1.137.439.390.530,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp 472.659.248.899,00
2) Belanja Bunga	Rp -
3) Belanja Subsidi	Rp -
4) Belanja Hibah	Rp 13.017.891.250,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.020.150.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 1.437.975.300,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 215.759.968.644,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 906.931.413,00</u>
	Rp 705.802.165.506,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp 10.541.667.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 226.609.658.244,00
3) Belanja Modal	<u>Rp 188.985.899.280,00</u>
	Rp 426.137.225.024,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.131.939.390.530,00</u>
Surplus / (Defisit)	<u>Rp 5.500.000.000,00</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp 15.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 20.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>(Rp 5.500.000.000,00)</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan

Rp N I H I L

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI BARITO KUALA,



HASANUDDIN MURAD



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.137.439.390.530,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.120.250.530,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.424.800.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	32.000.000,00	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	32.000.000,00	Perda No. 10 Tahun 2011 jo. No. 7/2016
4.1.1.02	Pajak Restoran	288.000.000,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	40.000.000,00	Perda No. 10 Tahun 2011 jo. No. 7/2016
4.1.1.02.05	Katering	248.000.000,00	Perda No. 10 Tahun 2011 jo. No. 7/2016
4.1.1.03	Pajak Hiburan	10.800.000,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	4.000.000,00	Perda No. 10 Tahun 2011 jo. No. 7/2016
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	4.800.000,00	Perda No. 10 Tahun 2011 jo. No. 7/2016
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	2.000.000,00	Perda No. 10 Tahun 2011 jo. No. 7/2016
4.1.1.04	Pajak Reklame	215.000.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	215.000.000,00	Perda No. 10 Tahun 2011 jo. No. 7/2016
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	5.929.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.929.000.000,00	Perda No. 10 Tahun 2011 jo. No. 7/2016
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	200.000.000,00	
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	200.000.000,00	Perda No. 10 Tahun 2011 jo. No. 7/2016
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000.000,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	1.500.000.000,00	Perda No.02 Tahun 2013
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.250.000.000,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	3.250.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.711.782.520,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	646.000.500,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	337.099.700,00	Perda No. 12 Tahun 2011 j.o No.9/2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	12.000.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	53.000.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011 j.o No.9/2016
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	6.900.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011 j.o No.9/2016
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	211.980.800,00	Perda No. 12 Tahun 2011 j.o No.9/2016
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	1.350.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011 j.o No.9/2016
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	14.670.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011 j.o No.9/2016
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	9.000.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011 j.o No.9/2016
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.731.384.508,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	178.071.508,00	Perda No. 11 Tahun 2011 j.o No.8/2016
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	658.900.000,00	Perda No. 11 Tahun 2011 j.o No.8/2016
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	141.204.000,00	Perda No. 11 Tahun 2011 j.o No.8/2016
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	15.240.000,00	Perda No. 11 Tahun 2011 j.o No.8/2016
4.1.2.02.14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	3.960.000,00	Perda No. 11 Tahun 2011 j.o No.8/2016
4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	383.694.000,00	Perda No. 11 Tahun 2011 j.o No.8/2016
4.1.2.02.24	Retribusi Penyebrangan Orang	61.565.000,00	Perda No. 11 Tahun 2011 j.o No.8/2016
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	288.750.000,00	Perda No. 11 Tahun 2011 j.o No.8/2016
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.334.397.512,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.081.339.585,00	Perda No. 13 Tahun 2011
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	249.607.927,00	Perda No. 13 Tahun 2011
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	3.450.000,00	Perda No. 13 Tahun 2011
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.943.000.000,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.943.000.000,00	
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	6.943.000.000,00	Perda No. 4 Tahun 2013
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.040.668.010,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	904.800.000,00	
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	904.800.000,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	1.745.200.000,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	1.745.200.000,00	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	345.000.000,00	
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	
4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pengembalian atas pekerjaan	125.000.000,00	
4.1.4.10.07	Pendapatan dari Pengembalian hasil temuan	75.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.4.10.08	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran tambahan penghasilan PNS	45.000.000,00	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	17.914.883.010,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum RSUD. H. Abdul Aziz Marabahan - BLUD	16.936.276.010,00	Perbub. No. 39 Tahun 2011
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	50.400.000,00	
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	928.207.000,00	Perbub. No. 39 Tahun 2011
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5.130.785.000,00	
4.1.4.22.01	Dana Kapitasi JKN FKTP Jejangkit	237.104.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.02	Dana Kapitasi JKN FKTP Jelapat	449.764.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.04	Dana Kapitasi JKN FKTP Kuripan	112.818.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.05	Dana Kapitasi JKN FKTP Tabukan	181.470.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.06	Dana Kapitasi JKN FKTP Marabahan	468.877.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.07	Dana Kapitasi JKN FKTP Lepas	231.178.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.08	Dana Kapitasi JKN FKTP Bantuil	101.195.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN FKTP Barambai	270.871.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN FKTP Mandastana	384.907.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN FKTP Belawang	254.901.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN FKTP Anjir Muara	584.223.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN FKTP Anjir Pasar	184.919.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN FKTP Mekarsari	188.789.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN FKTP Tabungane	357.329.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN FKTP Berangas	762.056.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN FKTP Rantau Badauh	149.487.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.1.4.22.19	Dana Kapitasi JKN FKTP Wanaraya	210.897.000,00	SK Kadis Kes No 445/3328/Dinkes
4.2	DANA PERIMBANGAN	881.822.886.000,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	90.650.978.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	20.628.232.000,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	12.216.541.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	8.411.691.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	70.022.746.000,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	105.678.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	67.927.728.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	496.216.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.2	Dana Alokasi Umum	573.939.013.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	573.939.013.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	573.939.013.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	217.232.895.000,00	
4.2.3.01	DAK FISIK	103.960.000.000,00	
4.2.3.01.01	DAK Reguler Bidang Pendidikan	5.957.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.01.02	DAK Reguler Bidang Kesehatan	7.170.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.01.03	DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	7.932.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.01.04	DAK Reguler Bidang Pertanian	2.248.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.01.07	DAK Reguler Bidang Pariwisata	1.600.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.01.13	DAK Rujukan Bidang Air Minum	3.810.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.01.14	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	5.090.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.01.15	DAK Penugasan Bidang Jalan	46.810.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.01.16	DAK Penugasan Bidang Pasar	936.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.01.17	DAK Penugasan Bidang Irigasi	17.872.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.01.22	DAK Afirmasi Transportasi	4.535.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.02	DAK NON FISIK	113.272.895.000,00	
4.2.3.02.02	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.804.600.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.02.03	Tunjangan Profesi Guru	86.106.432.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.02.04	Tambahan Penghasilan Guru	2.310.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.02.05	Tunjangan Khusus Guru	2.932.336.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.02.06	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	14.005.319.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.2.3.02.08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.114.208.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	204.496.254.000,00	
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	2.500.000.000,00	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	2.500.000.000,00	NPH Tahun 2014
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45.780.000.000,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	45.780.000.000,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.368.394.000,00	Perda Prov. Kalsel No 5 Thn 2011
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.396.509.000,00	Perda Prov. Kalsel No 5 Thn 2011
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.707.430.000,00	Perda Prov. Kalsel No 5 Thn 2011
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	36.504.000,00	Perda Prov. Kalsel No 5 Thn 2011
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	9.271.163.000,00	Perda Prov No 9 Tahun 2013
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	156.216.254.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	156.216.254.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	Informasi Kementerian Keuangan
4.3.4.01.06	Dana Desa	148.716.254.000,00	
5	BELANJA	1.131.939.390.530,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	705.802.165.506,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	472.659.248.899,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	320.086.859.670,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	246.924.268.592,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	20.872.213.890,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.462.431.000,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	17.124.136.900,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.033.065.000,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	12.911.995.411,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.165.116.825,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.018.727,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.900.239.800,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	67.032.000,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	24.299.100,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	43.299.900,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	24.299.100,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	32.292.225,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.124.000.000,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	49.455.000,00	
5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Ketenaga Kerjaan	1.316.840.100,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	148.457.080.229,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	635.751.000,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	681.070.500,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Daerah	55.133.917.829,00	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan profesi Guru	86.106.432.000,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Guru	2.310.000.000,00	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Khusus Guru	2.932.336.000,00	
5.1.1.02.10	Tambahan Penghasilan Lembur PNS	657.572.900,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.358.480.000,00	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	571.240.000,00	
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	571.240.000,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	185.589.000,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	185.589.000,00	
5.1.4	Belanja Hibah	13.017.891.250,00	
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.558.291.250,00	
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.558.291.250,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	4.655.000.000,00	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	4.655.000.000,00	
5.1.4.08	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	6.804.600.000,00	
5.1.4.08.01	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	6.804.600.000,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.020.150.000,00	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.920.150.000,00	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	1.920.150.000,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	
5.1.5.03.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada individu dan / atau keluarga yang tidak direncanakan	100.000.000,00	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.437.975.300,00	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.085.356.000,00	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.085.356.000,00	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	352.619.300,00	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	352.619.300,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	215.759.968.644,00	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	215.175.253.100,00	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	66.458.999.100,00	
5.1.7.03.03	Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Desa	148.716.254.000,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	584.715.544,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	246.799.013,00	
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	56.315.866,00	
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	40.587.704,00	
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	62.084.850,00	
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	59.417.975,00	
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	44.368.266,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	39.179.594,00	
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	35.962.276,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	906.931.413,00	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	906.931.413,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	906.931.413,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	426.137.225.024,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	10.541.667.500,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4.340.116.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.513.560.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	353.043.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	136.800.000,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	118.843.000,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	217.870.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.201.551.500,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	6.201.551.500,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.609.658.244,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.834.233.747,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.372.181.512,00	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	155.538.750,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	218.373.685,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	138.113.800,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	331.664.000,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.611.382.000,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.980.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.577.568.400,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.337.727.000,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	890.227.500,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	9.750.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.971.164.729,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	876.478.500,00	
5.2.2.02.06	Belanja Dekorasi	586.862.165,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan logistik dan Perlengkapan rumah tangga	916.519.573,00	
5.2.2.02.08	Belanja bahan baku percontohan	384.559.000,00	
5.2.2.02.10	Belanja bahan kompensasi	648.220.000,00	
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Diklat/Bintek	840.482.300,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.02.16	Belanja Perlengkapan Medis	1.724.154.628,00	
5.2.2.02.17	Belanja Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1.247.178.005,00	
5.2.2.02.18	Belanja pakan ternak/ ikan	144.245.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.789.681.528,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	493.280.000,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	582.683.352,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.765.944.122,00	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1.200.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	396.881.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.194.851.840,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	40.023.500,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	22.125.000,00	
5.2.2.03.12	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.099.155.000,00	
5.2.2.03.13	Upah Tenaga Harian Lepas	208.990.000,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi	2.100.733.300,00	
5.2.2.03.15	Belanja dokumentasi	175.458.725,00	
5.2.2.03.16	Belanja jasa medik	19.232.353.364,00	
5.2.2.03.18	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	22.771.500,00	
5.2.2.03.19	Biaya jasa pemeriksaan laboratorium	88.120.000,00	
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Kebersihan Kantor, Gedung dan Bangunan	1.183.909.000,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa administrasi/teknis kantor	14.181.201.825,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.955.322.944,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	558.107.000,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.800.765.300,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.114.445.844,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.520.000,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	297.298.100,00	
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.993.700,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	164.193.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.723.863.770,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.511.630.030,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.081.278.840,00	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	130.954.900,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	602.035.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	472.335.000,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	93.700.000,00	
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	36.000.000,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	598.459.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	45.782.000,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	447.147.000,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.200.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	60.330.000,00	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Pendingin Ruangan	21.000.000,00	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Senjata	3.500.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.101.698.000,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.672.152.500,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.062.113.500,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	451.635.500,00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	304.301.500,00	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	7.736.260.000,00	
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman pendamping pasien keluarga kurang mampu	875.235.000,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	347.730.000,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	111.100.000,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	18.000.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	49.250.000,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	83.180.000,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	86.200.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	234.932.000,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	234.932.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	979.937.000,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.000.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	398.420.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	287.725.000,00	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Acara Khusus	289.792.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.418.964.355,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.803.628.870,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.615.335.485,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	190.000.000,00	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	40.000.000,00	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	110.000.000,00	
5.2.2.16.04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	40.000.000,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.835.750.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.339.000.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	20.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	476.750.000,00	
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	11.025.000,00	
5.2.2.18.02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	11.025.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.161.908.650,00	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.457.200.000,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.770.350.650,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.236.353.000,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	28.000.000,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan jaringan irigasi	20.670.005.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.411.367.000,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	588.892.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.577.000.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	245.475.000,00	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.192.721.847,00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	899.922.347,00	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	292.799.500,00	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.647.533.153,00	
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.647.533.153,00	
5.2.2.27	Belanja Hibah Barang /Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.294.194.350,00	
5.2.2.27.01	Belanja Hibah Barang /Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.251.216.300,00	
5.2.2.27.02	Belanja Hibah Barang /Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.042.978.050,00	
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang /Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	776.132.500,00	
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang /Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada anggota/kelompok Masyarakat	776.132.500,00	
5.2.2.29	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	924.600.000,00	
5.2.2.29.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	196.350.000,00	
5.2.2.29.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	728.250.000,00	
5.2.3	Belanja Modal	188.985.899.280,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.363.050.000,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.363.050.000,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	5.980.698.375,00	
5.2.3.13.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	41.100.000,00	
5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	5.000.000.000,00	
5.2.3.13.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi	939.598.375,00	

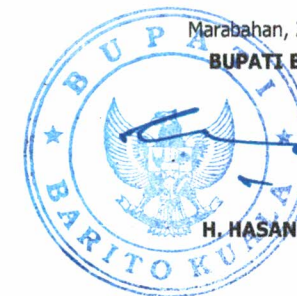
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.765.035.525,00	
5.2.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	1.765.035.525,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	634.597.000,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	23.468.000,00	
5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	611.129.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.257.070.750,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	674.770.000,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	412.540.000,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.352.620.000,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	492.642.750,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	284.498.000,00	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.000.000,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	23.500.000,00	
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	3.500.000,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	20.000.000,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	90.484.775,00	
5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing	90.484.775,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.839.970.000,00	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	55.000.000,00	
5.2.3.26.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen	1.755.370.000,00	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	29.600.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	856.499.175,00	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	14.710.000,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	192.072.000,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	649.717.175,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.041.045.964,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	405.383.157,00	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	62.750.000,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	360.632.500,00	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	23.875.000,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.188.405.307,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.081.890.018,00	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	30.000.000,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	469.211.135,00	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	3.250.000,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	67.550.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	279.783.573,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	232.095.310,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	339.402.500,00	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	117.166.000,00	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	15.535.000,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	57.250.000,00	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	62.155.000,00	
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	26.420.000,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	60.876.500,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	363.000.000,00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	69.500.000,00	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	293.500.000,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	9.697.175,00	
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	3.250.000,00	
5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	6.447.175,00	
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	121.533.314,00	
5.2.3.33.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	121.533.314,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.020.578.348,00	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.819.839.275,00	
5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	1.197.609.073,00	
5.2.3.34.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	3.130.000,00	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	40.568.000,00	
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	13.568.000,00	
5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	19.000.000,00	
5.2.3.36.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	8.000.000,00	
5.2.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	49.904.900,00	
5.2.3.39.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	49.904.900,00	
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	288.017.250,00	
5.2.3.42.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	288.017.250,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	18.480.000,00	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	18.480.000,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	53.281.953.828,00	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	22.474.203.892,00	
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	2.601.070.000,00	
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	3.055.359.904,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	546.000.000,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.575.362.000,00	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.729.875.164,00	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.671.766.450,00	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.366.500.000,00	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	17.300.000,00	
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	3.516.780.000,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.727.736.418,00	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	210.850.000,00	
5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	210.850.000,00	
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	155.385.000,00	
5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	155.385.000,00	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	347.850.000,00	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	347.850.000,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	63.845.427.750,00	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	38.073.926.250,00	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	21.806.947.000,00	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	3.964.554.500,00	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	25.103.421.680,00	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	23.070.545.000,00	
5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	1.995.572.000,00	
5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	37.304.680,00	
5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	499.636.000,00	
5.2.3.62.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	499.636.000,00	
5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	405.140.000,00	
5.2.3.63.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	405.140.000,00	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	141.765.608,00	
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	141.765.608,00	
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	12.782.580.442,00	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	12.782.580.442,00	
5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	182.340.000,00	
5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	182.340.000,00	
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	867.765.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	867.765.000,00	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.790.960.000,00	
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	278.940.000,00	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	1.512.020.000,00	
5.2.3.80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	107.712.003,00	
5.2.3.80.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	107.712.003,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.626.100.000,00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.626.100.000,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.200.000,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.200.000,00	
5.2.3.91	Belanja Modal Aset Lainnya	1.450.788.900,00	
5.2.3.91.01	Belanja Modal Aset Lainnya - Perangkat Lunak	126.823.900,00	
5.2.3.91.04	Belanja Modal Aset Lainnya - Kajian (DED)	1.299.465.000,00	
5.2.3.91.05	Belanja Modal Aset Lainnya - Warisan Budaya	24.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.500.000.000,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4.000.000.000,00	
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	4.000.000.000,00	
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	4.000.000.000,00	
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	11.000.000.000,00	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	11.000.000.000,00	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	11.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.500.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.500.000.000,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.500.000.000,00	
6.2.2.02.01	BUMD PDAM Marabahan	2.500.000.000,00	Perda No 9 Tahun 2013
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	7.000.000.000,00	Perda Nomor 10 Tahun 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	
6 . 2 . 4 . 03	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat/kelompok masyarakat	11.000.000.000,00	
6 . 2 . 4 . 03 . 01	Pemberian Pinjaman Kepada Masyarakat/kelompok masyarakat	11.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.500.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	



Marabahan, 22 December 2016

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD